



AKAR ORIENTASI KEAGAMAAN DALAM PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

HERY NOER ALY¹

¹ herynoer@iainbengkulu.ac.id

Abstract: The Root of Religious Orientation in Islamic Education Thought.

This study is aimed at exploring the roots of religious orientation in Islamic education thought. The method used in this study is literature study; by exploring the similarities and differences in the thoughts of leading Muslim education experts, especially those listed in the book of *Ihya Ulûm ad-Dîn* and *Ayyuhal Walad* by al-Gazâli & *Adâb al-Muta'allimîn* by Nasîr ad-Dîn at-Ṭûsi. The result reveals that the principles of Islamic education that must be adhered to by educators must lead to the concept of religiosity, which is to seek the divine wisdom of Allah. Education is a moral responsibility and also a responsibility to Allah SWT. Hence, it emerges two sides of thought, namely the conservatives who underestimate worldly affair and the modern side who are too concerned with the affairs of the world. The underlying causes of the two thoughts was born thinkers such as Ibn Sahnun, al-Qabisi (324-403 H), Ibn Miskawaih (d. 421 H), al-Gazali (450-505 H), at-Tusi (597-672 H), Ibn Jama'ah (639-733 H), Ibn Khaldun (732-808 H), and Ibn Hajar al-Haitami in Egypt (909-974 H). In the field, they have different experience in accordance with developing scientific studies, but they remain in one connecting line, namely religious orientation.

Keyword: islamic education thought; religious orientation; al-Gazâli; at-Ṭûsi

Abstract: Akar Orientasi Keagamaan dalam Pemikiran Pendidikan Islam.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akar orientasi keagamaan dalam pemikiran pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni dengan mengeksplorasi kajian terhadap persamaan dan perbedaan dalam beragam pemikiran pakar pendidikan muslim terkemuka, terutama yang tercantum dalam kitab *Ihya Ulûm ad-Dîn*, dan *Ayyuhal Walad* karya al-Gazâli & *Adâb al-Muta'allimîn* karya Nasîr ad-Dîn at-Ṭûsi. Hasil penelusuran mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam yang harus dipegang oleh para pendidik harus bermuara pada konsep religiusitas, yakni mencari kiridaan Allah Swt. Pendidikan merupakan tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab kepada Allah Swt. Dari sini muncullah dua sisi pemikiran, yakni kaum konservatif yang menganggap rendah urusan dunia dan kaum modern yang tertalu mengedepankan urusan dunia. Benang merah dari dua pemikiran itu lahirlah para pemikir seperti Ibn Sahnun, al-Qabisi (324-403 H), Ibn Miskawaih (w. 421 H), al-Gazali (450-505 H), at-Tusi (597-672 H), Ibn Jama'ah (639-733 H), Ibn Khaldun (732-808 H), dan Ibn Hajar al-Haitami di Mesir (909-974 H). Di lapangan, mereka mengalami perbedaan sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan yang berkembang, tetapi mereka tetap berada dalam satu benang merah, yaitu orientasi keagamaan.

Kata Kunci: pemikiran pendidikan Islam; orientasi keagamaan; al-Gazâli; at-Ṭûsi

To cite this article:

Aly, H. N. (2020). Akar Orientasi Keagamaan dalam Pemikiran Pendidikan Islam. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(2), 445-463. <http://dx.doi:10.29300/atmipi.v19.i2.3784>

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang akar orientasi keagamaan dalam pemikiran pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh kenyataan masalah di Indonesia yang hingga awal abad XXI ini masih belum terselesaikan, yaitu dikotomi ilmu dan dikotomi pendidikan. Masalah itu pada tahun 1970-an telah turut memunculkan pemikiran yang mendorong penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap, dalam arti penyelenggaraan semua jenis pendidikan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Munculnya nomenklatur tentang madrasah—sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003—memberikan angin segar terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Adanya pengertian madrasah yang berbunyi sekolah umum yang berciri khas Islam dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut (Setyaningsih, 2016, p. 176), meskipun nomenklatur itu masih belum bisa menghilangkan citra masyarakat luas bahwa madrasah adalah sekolah agama.

Perjuangan untuk memasukkan madrasah dengan fokus utama pengajaran agama dalam sistem pendidikan nasional berhasil setelah diundangkannya UU sisdiknas No.20 Tahun 2003. Dalam pasal 15 disebutkan adanya kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus. Dalam pendidikan keagamaan ini termasuk lagi madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam. MI, MTs, MA dan MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan keagamaan ini diatur dalam bagian tersendiri pasal 30.

Wacana islamisasi ilmu pengetahuan yang mulai marak di tahun 1980-an dan mengkristal dalam bentuk program *wider-mandate* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta perubahan bentuk dari IAIN ke Universitas Islam Negeri (UIN) dipandang baru mampu menyandingkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Dalam pada itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan kembali mempertegas memang ada pengkhususan – kalau bukan pemisahan – di dalam pendidikan.

Kajian historis diharapkan dapat mengungkap orientasi awal pendidikan Islam, kemudian perubahannya menjadi orientasi-orientasi lain. Studi ini tidak berpretensi untuk membentangkan sejarah orientasi tersebut dari masa-masa. Studi ini akan membatasi perhatiannya pada orientasi keagamaan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggalan data dari sumber-sumber pemikiran yang tertulis di dalam buku. Untuk itu, penelitian ini dapat dikategorikan pada studi pustaka (*literature reseacrh*, bukan *library research*). Silalahi mengatakan bahwa studi pustaka memang banyak digunakan oleh para peneliti di bidang humaniora, sosial, dan agama (Silalahi, 2006). Penggalan data penelitian ini adalah dengan menelusuri pemikiran tokoh keislaman yang terdapat dalam sumber kitab (buku berbahasa Arab). Penelitian kualitatif itu bersifat eksploratif, sedangkan penelitian kuantitatif lebih bersifat mengukur dan mendeskripsikan (Darmalaksana, 2020b).

Sumber buku yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Ihyâ Ulûm ad-Dîn* dan *Ayuhal Walad* karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazâli dan kitab *Adâb al-Muta'allimîn* karya Nasir ad-Dîn at-Tûsi. Kedua kitab ini sangat fenomenal, terutama kitab karya al-Gazali yang sangat masyhur di negara-negara bermazhab Syafi'i. Di Indonesia, kitab Ihya ini sangat masyhur, yakni di pondok-pondok pesantren.

Dengan mengadopsi pendapat Darmalaksana, langkah-langkah analisis penelitian ini adalah (1) menelusuri sumber primer dan skunder, (2) mengkategorisasi data berdasarkan formula penelitian, (3) mengolah data/mengutip referensi, (4) menampilkan data, (5) abstraksi data, (6) interpretasi data, dan (7) kesimpulan (Darmalaksana, 2020a). Skenario jenis penelitian ini diciptakan oleh Daralaksana khusus untuk penelitian studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Pendidikan Islam

Esensi pendidikan Islam telah digariskan di dalam Al-Qur'an, dan lebih terperinci di dalam sunnah Nabi saw (Muhinna, 1982, p. 3). Al-Qur'an merupakan undang-undang umum di dalam Islam dan secara tak terbantahkan merupakan sumber utama legislasi (*tasyri'*), dan Sunnah Nabi saw merupakan sumber kedua karena merupakan aplikasi praktis dari ajaran-ajaran Al-Qur'an (Shomad, 2017, p. 7; Sulistiani, 2018, p. 2). Esensi ini selama lebih kurang dua abad sejak Nabi saw. wafat terus memenuhi segala aspek kehidupan kaum muslimin, termasuk pemikiran mereka tentang pendidikan.

Islam merupakan *common denominator* yang mendekatkan dan mempersatukan berbagai corak pemikiran para pendidik muslim. Islam selalu menjadi benang merah untuk melihat adanya keserupaan dalam tujuan dan metode pendidikan yang mereka kembangkan. Fakta ini menjadi kunci bagi peneliti di dalam memahami ruh pendidikan Islam.

Smith mengakui bahwa pemikiran para sarjana muslim itu sangat istimewa dan sangat kaya (Smith, 1959, p. 400). Pernyataan Smith ini kemudian didukung oleh Rahman yang memang pemikir brilian muslim, sang guru Nurcholis Madjid penarik gerbong pembaharuan di Indonesia dan juga guru Ahmad Syafii Maarif, bahwa dengan bimbingan wahyu telah terjadi gerakan pemikiran Islam tingkat tinggi (Rahman, 1984, p. 150). Beberapa

pemikir seperti Ibn Sahnun di Maroko (w. 256 H), Ikhwan al-Shafa di Irak (abad ke-4 H), al-Qabisi sang ahli fikih dari Qairawan (324-403 H) (Syams ad-Din, 1985), Ibn Miskawaih (w. 421 H), al-Gazali (450-505 H), Nashiruddin al-Thusi (597-672 H), Ibn Jama'ah (639-733 H), Ibn Khaldun (732-808 H), sampai Ibn Hajar al-Haitami di Mesir (909-974 H) telah membentuk karakter pemikiran mereka dengan Islam. Mereka menggali prinsip-prinsip dan idea-idealnya serta mengkristalisasikan tujuan-tujuannya. Di berbagai negara, di situ Islam merupakan faktor utama penyebab keberadaannya, para pendidik telah membebaskan pikiran mereka dari segala pertimbangan yang tidak esensial. Islam benar-benar telah memenuhi pemikiran pendidikan Islam kaum muslimin sehingga menjadi watak dan memberinya orientasi yang khas, yaitu orientasi keagamaan.

Orientasi tersebut sebenarnya tidak aneh. Yang aneh justru apabila pemikiran itu memilih orientasi lain. Sewaktu para pendidik muslim menafsirkan alam semesta dan wujud berdasarkan agama, maka logis jika kemudian agama itu sendiri dijadikan tujuan dan pendidikan dijadikan sarana yang disyariatkan untuk mencapai tujuan itu. Sewaktu mereka menjadikan tujuan keagamaan sebagai tujuan pendidikan dalam membimbing akal dan hati generasi muda, tampak jelas hubungan antara kepribadian dan pemikiran mereka. Al-Gazali, misalnya, di dalam *Ihya' 'ulum al-Din*, menekankan agar pelajar memusatkan tujuannya pada pencapaian ilmu yang bermanfaat di akhirat dan memotivasi ketaatan, serta menghindari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat dan sarat dengan perdebatan serta pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan kewajiban memperkuat keyakinan yang dalam pandangannya merupakan modal dasar (Al-Gazâli, 1992, p. 14). Maka logis jika ia memberi nilai pada ilmu dari sudut pandangan *ad-daruriyyât ad-diniyyah* (urgensi keagamaan). Di dalam risalahnya, *Ayyuha al-Walad*, ia menasihati pelajar dengan kata-katanya:

اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها ، واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها ، واعمل للجنة بقدر حاجتك إليها ، واعمل للنار بقدر صبرك عليها .

Berbuatlah untuk kepentingan duniamu sekedar cukup untuk akmu tinggal di dalamnya; berbuatlah untuk kepentingan akhiratmu sekedar cukup untuk kamu tinggal di dalamnya; berbuatlah untuk memperoleh surga sekedar kebutuhanmu kepadanya; dan berbuatlah untuk neraka sekedar kesabaranmu terhadapnya (Al-Gazâli, 2010, p. 121).

Selanjutnya, dalam pandangannya, apabila kaidah di atas diamalkan, maka pelajar tidak akan membutuhkan – dan tidak perlu dibebani dengan – ilmu yang banyak. Demikianlah, rasa keberagamaannya telah mencapai batas yang membuatnya kadang-kadang secara lantang melarang mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu keagamaan. Misalnya, ia mengemukakan:

أيها الولد : أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام ، والخلاف والمنطق والطب والدواوين والأشعار ، والنجوم ، والعروض ، والنحو والتصريف ، غير تضييع العمر .

Duhai anakku, selain menyia-nyiakan umur, apa hasil yang akan kamu peroleh dari mempelajari ilmu kalam, ilmu khilaf (perbedaan pendapat), mantiq, kedokteran, perkantoran, syair, perbintangan, nahwu, dan tashrif? (Al-Gazâli, 2010, p. 107)

Orientasi keagamaan tampak jelas pula pada pemikiran al-Thusi. Ia mewajibkan kepada pelajar agar di dalam menuntut ilmu berniat untuk memperoleh rida Allah, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang-orang bodoh lainnya, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam dengan melakukan amar makruf serta sebisa mungkin mencegah kemungkaran dari dirinya dan orang lain (Al-Thusi, 1996, p. 64).

Sejalan dengan al-Thusi, Ibn Jama'ah mengingatkan bahwa semua yang dijelaskan di dalam Al-Qur'andan Hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama tidak lain dalam konteks ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengorientasikan ilmunya untuk memperoleh rida Allah dan dekat kepada-Nya di surga yang penuh kenikmatan, bukan dalam konteks orang yang

mencari ilmu dengan niat buruk atau untuk mencapai tujuan duniawi seperti kehormatan, harta, atau kebanggaan dengan banyak pengikut dan pelajar. Kemudian ia mengaksentuasikan pemikirannya pada fikih dengan alasan bahwa fikih dapat mendekatkan orang untuk mengetahui Allah (*ma'rifah Allah*). Ia berdalil dengan Hadis yang menyatakan bahwa majelis fiqih lebih baik ketimbang ibadah selama enam puluh tahun (Gade, 2015; Ibn Jama'ah, 2011, pp. 5-14).

Implikasi dari Orientasi Keagamaan

Orientasi keagamaan yang begitu kuat dalam pendidikan Islam telah melahirkan sejumlah implikasi yang penting dan berpengaruh jauh dalam penetapan bentuk kelembagaan dan isi pendidikan Islam. Ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Implikasi tersebut diuraikan di bawah ini.

Implikasi pertama, kata *'ilm* yang di dalam Al-Qur'andan Hadis diungkapkan secara tidak terbatas (*mutlaq*) menjadi terbatas (*muqayyad*) pada *al-'ilm bi Allâh* (pengetahuan tentang Allah). Demikian menurut mayoritas pakar pendidikan muslim selain Ikhwan al-Shafa, Ibn Miskawaih, Ibn Khaldun, dan lain-lain.

Implikasi kedua, kehausan akan keluhuran spiritual telah mendorong pemikiran konservatif pendidikan Islam untuk menilai rendah urusan keduniaan seperti berbagai kesenangan yang mubah, termasuk profesi dan pekerjaan. Padahal urusan seperti itu—sedikit banyak—merupakan soko guru kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan hidup manusia di bumi. Bahkan sebagian pemikir pendidikan muslim terkemuka secara lantang memandang hina berbagai keterampilan dengan memberinya predikat yang ekstrem. Al-Gazali, misalnya, ketika menyajikan kriteria perbandingan keutamaan ilmu agama dengan pengetahuan ilmiah, mengungkapkan bahwa keutamaan itu relatif. Penilaian rendah terhadap bendaharawan ketika dibandingkan dengan raja tidak menunjukkan nilai rendahnya ketika dibandingkan dengan tukang sapu. Maka jangan dikira bahwa pekerjaan

yang turun dari derajat tertinggi itu telah jatuh nilainya. Sesungguhnya derajat tertinggi itu ditempati oleh para nabi, kemudian secara gradual para wali, para ulama yang komitmen dengan ilmunya, kemudian para orang saleh dengan perbedaan derajatnya (Al-Gazâli, 1992, p. 29). Ibn Jama'ah bahkan melangkah lebih jauh lagi. Ia meminta kepada para pelajar untuk menyucikan diri dari pekerjaan yang menurut tabiatnya adalah rendah serta dari pekerjaan yang menurut adat dan syara' adalah makruh seperti bekam, samak kulit, dan penyepuhan. Penilaian rendah itu tetap menjadi prinsip sekalipun memasukkan profesi bekam ke dalam kategori ilmu-ilmu fardu kifayah (Ibn Jama'ah, 2011, p. 11).

Implikasi ketiga, para pemikir pendidikan muslim memandang bahwa tujuan memperoleh ilmu adalah untuk ilmu itu sendiri. Dalam pandangan Kuntowijoyo, para pelajar muslim sudah menggeser dari pandangan doktrin ideologi menuju ke periode ilmu (Ali, 2016). Ekstremitas pandangan ini telah mendorong sebagian pendidik untuk menutup peluang bagi masuknya pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia di muka bumi, baik untuk memperbaiki taraf hidup maupun untuk menambah kebahagiaan individual. Dari sini tampak bahwa pandangan tentang "ilmu untuk ilmu" – seperti ditemukan dalam peristilahan modern – mendapatkan posisi terhormat pertama dalam sejarah pemikiran Islam pada umumnya, dan pada khususnya aspek pendidikan. Al-Tusi mengatakan bahwa kenikmatan ilmu telah cukup menjadi pendorong untuk memperolehnya (Al-Thusi, 1996, p. 87). Demikian pula secara sistematis telah memasukkan ilmu ke dalam bab "sesuatu yang dicari untuk dzatnya," yaitu sesuatu yang lebih mulia dan lebih utama ketimbang yang dicari untuk selainnya.

Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Moral

Rasa tanggung jawab keagamaan para pendidik muslim, di satu sisi, telah mengikat pemikiran pendidikan mereka; di sisi lain memperlihatkan

dengan jelas tanggung jawab moral mereka yang jarang ditemukan pada bangsa-bangsa modern atau bangsa-bangsa lain semasa mereka.

Hal pertama yang mungkin menjadi daya tarik para pendidik muslim ialah penempatan posisi pendidikan pada tingkat tertinggi tanggung jawab moral. Tanggung jawab itu telah membuat hati dan akal mereka sibuk dengan berbagai pertanyaan, baik terkait dengan hukum maupun dengan pedagogi, yang lahir dari tingkat kesungguhan mereka di dalam menjalankan tugas pendidikan untuk mencapai rida Allah. Harus disadari oleh para pendidik bahwa penekanan pendidikan dalam Islam adalah kepasrahan kepada Allah Swt. Dalam ajaran Islam tidak ada pertentangan akal dan ilmu, juga antara ilmu dan agama. Hal ini karena kehadirannya telah berdamai dengan sains dan teknologi sejak wahyu turun hingga munculnya zaman modern di era digital (Al Amin & Ulfa, 2018). Hal itu tentunya merupakan pengentasan pendidikan dari sekedar profesi mencari rezki ke derajat kewajiban keagamaan.

Berikut ini sebuah contoh hidup seorang guru yang menunjukkan suatu bentuk penghargaan pendidik muslim terhadap kewajiban mendidik. Contoh ini diungkapkan oleh Ibn Hajar al-Haitami dan dijadikan fokus penulisan risalahnya berjudul *Tahrîr al-Maqâl fi Adab wa Ahkâm fi mâ yahtaj ilaihâ Mu'addib al-Atfâl*. Sang guru menjalani profesinya untuk pertama kalinya di dalam hidupnya. Ia menjawab sejumlah permasalahan berkaitan dengan pengelolaan *kuttab* (suatu bentuk lembaga pendidikan), perlakuan terhadap anak-anak di dalamnya, metode mengajar mereka, dan distribusi bantuan kepada mereka. Ia melihat setiap permasalahan dari sudut pandang agama semata, lalu meneliti setiap sudutnya secara seksama agar tidak terjerumus ke dalam maksiat yang tidak disengaja dan takut melakukan kekeliruan yang berkonsekuensi hukuman syariat. Ia menulis surat kepada Ibn Hajar seraya meminta interpretasi tentang maksud perkataannya, "Semoga Allah meridai kalian dan menjadikan kalian rida, serta menjadikan surga sebagai tempat

tinggal dan tempat kembali kalian.” Sang guru juga berusaha menjawab masalah seseorang yang memberikan wakaf tetapi belum mengetahui persyaratan wakaf yang berlaku dalam kasusnya dan belum ada hukum yang pernah ditetapkan oleh ahli fiqih tentang itu. Ini kasus baru yang belum jelas hukumnya, sementara orang yang memberikan wakaf itu ingin agar wakafnya akuntabel, terutama karena berkaitan dengan anak-anak yatim yang kebanyakan tidak mempunyai wali.

Intinya, pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada pelajar itu telah menyibukkan hati nurani seorang guru yang takut kepada Allah, sehingga ia meminta fatwa kepada ahli agar terhindar dari murka Allah (Rida, 1980, pp. 58–59). Di masa kini beberapa persoalan kecil yang lahir dari guru sering kali tampak tanpa landasan pemikiran. Bagi guru muslim, semua persoalan menjadi masalah besar karena menuntut penilaian dari sudut pandang kaidah keagamaan, sehingga melahirkan praktik-praktik yang benar secara agama. Misalnya, apakah boleh memukul pelajar yang membolos dari sekolah ataukah tidak? Jika boleh, berapa pukulan yang dibolehkan? Apakah pemukulan itu harus diketahui oleh wali ataukah tidak? Demikianpula ketika guru melandasi segala perilaku dan penghargaannya kepada pekerjaan dengan keikhlasan beragama, maka semuanya akan berubah menjadi ideal-ideal yang tinggi.

Tanggung jawab keagamaan dan moral telah memenuhi pemikiran para pendidik muslim. Karenanya, ketika mempelajari ilmu, mereka hanya menggunakan pertimbangan moral dan ideal semata, dengan mengutip sabda Rasulullah saw., mengemukakan, “Janganlah kalian mempelajari ilmu dari setiap orang alim, kecuali dari alim yang menyeru kalian untuk keluar dari lima menuju ke lima perkara: dari ragu menuju yakin, dari riya menuju ikhlas, dari rakus menuju zuhud, dari sombong menuju tawadu, dan dari permusuhan menuju nasihat” (Al-Gazâli, 1992, p. 62).

Kode Etik Profesi Keguruan

Rasa tanggung jawab keagamaan telah mendorong para pendidik muslim untuk menyepakati semacam kode etik profesi keguruan. Beberapa prinsip kode etik itu dapat disarikan dari beberapa karya pendidik muslim sebagai berikut:

Prinsip pertama: Wajib mengamalkan ilmu. Guru muslim wajib mengamalkan ilmunya. Perkataannya tidak boleh didustakan dengan perbuatannya. Sebab, ilmu diketahui dengan mata hati, sedangkan perbuatan diketahui dengan mata kepala. Orang yang memiliki mata kepala lebih banyak ketimbang yang memiliki mata hati. Maka, jika perbuatan bertentangan dengan ilmu, risalah akan terhalang (Al-Gazâli, 1992, p. 55). Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan buah yang dihempas angin. Sekalipun seseorang telah membaca ilmu selama seratus tahun dan menyusun seribu kitab, ia masih belum siap untuk menerima rahmat Allah Ta'ala, kecuali jika ilmu itu diamalkan. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (al-Najm, 39); dan "... Siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh...." (Al-Gazâli, 2010, pp. 99-100). Atas dasar itu, seorang alim hendaknya tidak menasihati orang lain dengan sesuatu sebelum ia sendiri mengamalkannya. Maka peringatan bagi guru untuk berhati-hati dalam menjadi seorang pemberi nasihat dan peringatan, karena hal itu mengandung bencana yang besar, kecuali jika ia lebih dahulu mengamalkan apa yang diucapkan (Al-Gazâli, 1992, p. 55).

Prinsip kedua: Membersihkan diri dari sifat tamak. Guru wajib membersihkan diri dari sifat tamak dan keinginan memperoleh rezeki dengan mengajarkan ilmu. Ia juga hendaknya mempunyai motivasi yang tinggi, tidak tamak terhadap harta orang lain. Al-Tusi mengemukakan prinsip ini dengan bersandar kepada apa yang diklaimnya sebagai sabda Rasulullah saw., yaitu: "Jauhilah sifat tamak karena ia merupakan kefakiran yang nyata sekarang;" dan sabdanya, "Semua orang berada dalam kefakiran karena takut fakir."

Oleh sebab itu, guru hendaknya berhati-hati agar tidak menjadikan ilmunya sebagai jembatan untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi (Al-Thusi, 1996, pp. 101-102).

Prinsip ketiga: Menjaga diri dari menerima hadiah dan pemberian. Guru hendaknya menjaga diri dari menerima hadiah dan pemberian para amir dan sultan sekalipun ia mengetahui bahwa semua itu berasal dari sumber yang halal. Hal itu karena “ketamakan merusak agama karena dapat melahirkan bujukan untuk memelihara dan menyetujui kezaliman mereka. Semua itu adalah kerusakan di dalam agama (Al-Gazâli, 2010, p. 140).”

Prinsip keempat: Toleransi. Guru wajib bertoleransi kepada para pelajar dan menghindarkan perselisihan di antara mereka karena hal itu akan menyia-nyiakan waktu (Al-Thusi, 1996, p. 116). Banyak cara guru yang dapat dilakukan guru untuk menanamkan toleransi pada peserta didiknya. Dengan menjalankan fungsi guru sebagai motivator, fasilitator, pengarah, dan evaluator, guru dapat leluasa menanamkan sikap toleransi kepada siswa (Majid, 2020).

Prinsip kelima: Menghargai kebenaran. Guru adalah pengawal kebenaran. Mereka wajib menghargainya dan mendidik murid untuk menghargainya. Atas dasar itu, kadang-kadang ia perlu bersikap keras terhadap pelajar yang melampaui batas dalam membahas kebenaran atau memperlihatkan penolakan setelah kebenaran itu tampak (Ibn Jama'ah, 2011, p. 42).

Prinsip keenam: Bersikap adil. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para nabi diperintahkan untuk merealisasikan keadilan, maka guru adalah orang yang lebih banyak diseru untuk mengikat diri dengan keadilan ketimbang selainnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk selalu bersikap adil di dalam pembahasan dan ceramahnya serta mendengarkan pertanyaan dari muridnya sekalipun masih muda (Ibn Jama'ah, 2011, p. 42).

Prinsip ketujuh: Menghindari mengaku-ngaku tahu. Guru tidak boleh berdusta tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Jika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, hendaknya ia menjawab dengan mengatakan “Aku tidak tahu.” Prinsip ini juga selaras dengan kode etik guru Indonesia yang dicanangkan oleh PGRI, yakni guru harus menjunjung tinggi kejujuran secara profesional (Sidiq, 2018, p. 54). Menjaga kejujuran adalah hal yang sangat prinsip bagi pribadi muslim, lebih-lebih guru pendidikan agama Islam. Ketika guru tidak mengetahui tentang pengetahuan sesuatu dan guru menjawab “belum tahu” di hadapan peserta didiknya, sebenarnya tidak lantas guru itu rendah atau jatuh martabanya. Justru guru telah menanamkan kejujuran bahwa betapa pentingnya sebuah kejujuran dan betapa sedikitnya ilmu manusia di sisi Allah. Agar tampak profesional, guru seharusnya menyuruh peserta didik bersama-sama mencari sebuah konsep atau pengetahuan yang belum diketahui itu.

Prinsip kedelapan: Ilmu untuk mengabdikan kepada orang banyak. Guru hendaknya menyadari bahwa tujuan ilmu ialah untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Sehubungan dengan prinsip ini, Ikhwan al-Shafa mengemukakan bahwa kondisi seseorang bersama ilmunya serupa dengan kondisinya bersama hartanya. Manusia bersama hartanya mempunyai empat kondisi: Pertama, mencari manfaat. Dalam kondisi ini manusia adalah pencari harta. Kedua, menyimpan apa yang telah diperolehnya. Dalam hal ini ia tidak lagi butuh untuk meminta atau mencari. Ketiga, menafkahkan harta untuk dirinya. Dalam kondisi ini ia adalah seorang pengguna. Keempat, memberi kepada orang lain. Dalam kondisi ini ia adalah seorang yang dermawan. Ini adalah kondisi paling mulia. Demikian pula bersama ilmu, ia mempunyai empat kondisi sebagai berikut: Pertama, kondisi mencari. Kedua, kondisi memperoleh sehingga tidak butuh untuk bertanya. Ketiga, kondisi berpikir tentang apa yang telah diperolehnya dan memanfaatkannya. Keempat, kondisi membela. Ini adalah kondisi paling mulia (Rida, 1980, p. 62).

Pandangan keagamaan terhadap pendidikan yang dimiliki bersama para pendidik muslim sebagaimana diuraikan di atas baru mampu membentuk satu kerangka pikir untuk melakukan ijtihad secara umum. Kerangka pikir itu belum mampu membentuk satu pandangan bersama tentang watak proses pendidikan, fungsi sosialnya, pengembangan kurikulum, belum pula tentang tabiat murid dengan segala kebutuhannya. Ini memang bukan sesuatu yang aneh dalam logika pergerakan umum peradaban Islam disebabkan adanya perbedaan situasi-situasi pemikiran dari berbagai kelompok sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya para pendidik muslim berbeda pandangan dan pemahaman tentang watak proses pendidikan, yaitu setelah bersentuhan dengan arus pemikiran yang lahir di masa Khalifah al-Ma'mun (786-833 M) melalui asimilasi antara pemikiran keagamaan semata dengan warisan peradaban Helenistik, India, dan Persia. Misalnya, di satu pihak, al-Tusi, al-Gazali, Ibn Jama'ah, dan lain-lain memandang ilmu dengan pandangan keagamaan semata, bahwa yang dimaksud dengan ilmu ialah *'ilm al-hal*, yaitu ilmu yang dibutuhkan secara aktual dan dapat membawa manfaat di kemudian hari sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan abadi. Sementara itu, di pihak lain, Ikhwan al-Shafa dan lain-lain—yang merupakan para penjaja pemikiran Yunani ke dalam pasar peradaban Islam—adalah orang-orang yang telah mengawinkan pandangan keagamaan dengan pandangan filosofis di dalam memahami makna ilmu. Mereka mengatakan bahwa semua pengetahuan adalah diperoleh (*muktasab, iquired*) dan sumbernya ialah indera. Mereka juga mengatakan bahwa hal-hal rasional yang berbeda pada permulaan rasio tidak lain adalah gambar-gambar bertitik yang tertangkap melalui indera ('Abd ad-Da'im, 1985, p. 257).

Namun, tidak semua pengetahuan diperoleh melalui. Ada jalan lain, yaitu jiwa (*al-nafs*). Meskipun banyak mengambil pengetahuan dari dasar-dasar ilmu melalui indera, jiwa sesungguhnya juga mempunyai dasar-dasar

lain dan perbuatan-perbuatan melalui dirinya sendiri yang tidak diambil sama sekali dari indera, yaitu dasar-dasar yang mulia dan luhur, yang menjadi landasan analogi-analogi yang benar (Ibn Miskawaih, 1985, p. 7). Untuk memahami pernyataan perlu kembali kepada teori Platonis tentang asal pengetahuan yang diungkapkan oleh Ikhwan al-Shafa, yaitu jiwa adalah tanda itu sendiri; artinya, bahwa prose belajar tidak lain adalah proses mengingat saja. Sebab, sebelum turun ke bumi, jiwa pernah mengetahui segala sesuatu; dan setelah turun ke bumi, ia menjadi lupa. Jadi, ketika belajar, manusia seakan-akan sedang mengingat sesuatu yang lama yang pernah ada padanya (Rida, 1980, p. 63). Mazhab tentang interpretasi terhadap sumber pengetahuan dan perolehannya itu dekat dengan interpretasi Ibn Khaldun terhadap dasar yang menyatakan bahwa pikiran yang membedakan manusia dari semua binatang ialah “pikiran yang dijadikan petunjuk untuk memperoleh penghidupannya, bekerja sama dengan sesama jenisnya, dan berkelompok dalam rangka kerja sama itu, serta menerima apa yang dibawa oleh para nabi.

Selanjutnya, para pendidik muslim benar-benar telah merasa nyaman dengan pemikiran penting dari pemikiran kependidikan Yunani, yaitu bahwa pengetahuan yang diterima manusia sudah merupakan semacam takdir yang diberikan kepadanya sejak mengeksplorasinya, mengembangkannya, sampai beradaptasi dengannya; artinya, manusia tidak memiliki kebebasan berusaha di dalam belajar. Setiap manusia diciptakan dengan membawa daya tertentu yang sesuai dengan tipe belajar tertentu. Plato telah menjelaskan pemikiran itu di dalam teorinya tentang jiwa yang diletakkannya untuk menginterpretasi perbedaan manusia dalam tabiat, pencapaian (*achievement*), dan tipe belajar yang sesuai dengannya. Menurut teori ini, ada tiga macam jiwa yang menempati tiga macam manusia, yaitu: (1) *Al-Nafs al-'aqilah* (jiwa berpikir) yang bertempat pada orang bijak, ulama, atau – seperti dinamakan Plato – para filosof yang raja. Mereka adalah orang-orang yang paling lurus

akalnya dan paling cerdas. Mereka itu orang-orang yang pantas disertai amanat untuk menetapkan hukum dan mengendalikan urusan negara. (2) *Al-Nafs al-Syujja'ah* (jiwa pemberani) yang bertempat pada balatentara yang memiliki tubuh yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang layak disertai amanat untuk melindungi negara dari serangan luar. (3) *Al-Nafs al-Syahwaniyyah* (jiwa bernaflu) yang bertempat pada para pekerja. Mereka adalah kaum mayoritas di dalam masyarakat. Mereka pantas disertai amanat untuk produksi pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

Teori Plato tentang jiwa di atas berimplikasi teori tentang pendidikan. Ia mengatakan bahwa selama setiap individu dikaruniai jiwa tertentu, maka perannya di dalam masyarakat telah ditakdirkan sebelum ia ada di muka bumi. Dengan demikian, jenis pendidikan yang sesuai dengannya dan wajib diterimanya di bawah pengawasan negara tergantung pada jenis jiwa yang diberikan kepadanya. Ia tidak bisa lari darinya karena keselamatan dan kemaslahatan negara berkaitan dengan jenis pendidikan yang mempersiapkannya untuk mengeksplorasi daya yang diciptakan baginya dan dalam tugas-tugas yang untuk itu ia ada. Atas dasar itu, tanggung jawab moral manusia berkaitan dengan sejauh mana ia melaksanakan tugas yang untuk itu ia diciptakan. Orang yang adil, sebagaimana dikatakan oleh Plato, ialah "orang yang menempati kedudukan yang dipersiapkan baginya, dan di situ ia mengerahkan segala kemampuannya untuk memberi kepada negara sesuai dengan apa yang ia ambil darinya. Negara seperti ini sesungguhnya merupakan suatu komunitas yang harmonis bagaikan simponi karena setiap unsur di posisinya wajib menjalankan tugasnya seperti musisi di dalam orkestra. Jika setiap orang keluar dari posisinya, misalnya, tentara menjadi hakim dan pekerja menjadi tentara, maka negara akan kacau balau." Pemikiran Plato ini telah menarik perhatian salah seorang gurubesar pendidikan Islam, yaitu al-Gazali. Ia telah mengemas pemikiran itu dengan kemasan agama yang indah. Ini tampak, misalnya, ketika ia menegaskan

bahwa salah satu tanda keberpalingan Allah dari hamba ialah kesibukannya dengan yang bukan urusannya. Orang yang sesaat saja menggunakan umurnya dalam suatu urusan yang bukan untuk itu ia diciptakan, maka ia layak untuk merugi berkepanjangan pada Hari Kiamat; dan siapa usianya telah melampaui 40 tahun, tetapi kebaikannya belum melampaui keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk menuju neraka.

Penegasan al-Gazali tentang urgensi keharusan manusia menggeluti bidang yang—sesuai dengan kodrat ciptaannya—diperuntukkan baginya, perlu diperbandingkan dengan apa yang pernah diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai tragedi. Dalam hal ini, ia banyak sama dengan pendapat al-Gazali yang menyatakan bahwa barangsiapa menyia-nyiakan umurnya sesaat dalam urusan yang bukan untuk itu ia diciptakan, maka ia akan merugi berkepanjangan pada Hari Kiamat (Al-Gazâli, 2010, p. 107). Tragedi, dalam pandangan Aristoteles, tidak ada di dalam kematian yang merupakan kesudahan alamiah setiap makhluk hidup, tidak pula di dalam musibah-musibah seperti kehilangan harta, kedudukan, atau kebahagiaan, karena semua itu hal-hal yang bisa datang di dalam masyarakat. Tragedi, menurut Aristoteles, ialah kegagalan manusia dalam merealisasikan risalah yang untuk itu ia diciptakan. Inilah interpretasi yang dapat dipetik dari alasan mengapa para tokoh tragedi dalam drama Yunani kuno adalah orang-orang yang tidak mampu merealisasikan risalah yang untuk itu ia diciptakan (Taufik, 2018).

D. KESIMPULAN

Pemikiran pendidikan Islam pada awal pertumbuhannya adalah berorientasi keagamaan. Orientasi ini merupakan hal natural jika dilihat dari sudut bahwa Islam sebagai pedoman hidup penganutnya memenuhi berbagai aspek kehidupan; dan secara perlahan menampakkan diri sebagai *common denominator* yang mempersatukan para pemikir pendidikan Islam dalam melahirkan pemikiran mereka tentang pendidikan. Benang merah pemikiran

itu tampak pada para pemikir seperti Ibn Sahnun di abad III H., kemudian pada al-Qabisi (324-403 H), Ibn Miskawaih (w. 421 H), al-Gazali (450-505 H), al-Tusi (597-672 H), Ibn Jama'ah (639-733 H), Ibn Khaldun (732–808 H), sampai dengan Ibn Hajar al-Haitami di Mesir (909-974 H). Dalam perkembangannya mereka mengalami perbedaan sesuai dengan penerimaan mereka terhadap pengetahuan yang berkembang. Meskipun demikian, mereka tetap berada dalam satu benang merah, yaitu orientasi keagamaan

E. REFERENCES

- 'Abd ad-Da'im, 'Abd Allah. (1985). *At-Tarbiyah 'Ibr al-Tarikh min al-'Ushur al-Qadimah hatta Awâ'il al-Qarn a;-'Isyrîn*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Amin, W., & Ulfa, M. (2018). Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Moralitas: Analisis Problem dan Tanggung Jawab Keilmuan. *TSAQAFAH*, 14(1), 25–54. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2295>
- Al-Gazâli, M. ibn M. A. H. (1992). *Ihyâ 'Ulum ad-Dîn*. Toha Putra.
- Al-Gazâli, M. ibn M. A. H. (2010). *Ayyuha al-Walad*. Dâr al-Basyâ'ir al-Islamiyyah.
- Ali, M. (2016). PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM AHMAD SYAFII MAARIF. 17(2), 1-14.
- Al-Thusi. (1996). *Adâb al-Muta'allimîn*. Syabakah al-Imamain al-Hasanain li at-Turâs wa al-Fikr al-Islamî.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Gade, S. (2015). KODE ETIK PENDIDIK MENURUT IBNU JAMA'AH. *Jurnal Pencerahan*, 9(1), 23–36.
- Ibn Jama'ah, B. ad-Din al-Kannani. (2011). *Tazkirah as-Sâm' wa al-Mutakallîm fî Adâb al-'Alim wa al-Muta'allim*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Miskawaih. (1985). *Tahzîb al-Akhlaq fi at-Tarbiyah*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Majid, M. F. A. F. (2020). Peran Guru Akidah Akhlak dalam Mengaktualisasikan Sikap Toleransi Pada Peserta Didik (Studi Kelas VIII MTs Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kab. Bone, Sulawesi Selatan). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 67–80. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.171-06>
- Muhinna, A. I. (1982). *At-Tarbiyah fi al-Islâm*. Dâr asy-Sya'b.
- Rahman, F. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Rida, M. J. (1980). *al-Fikr at-Tarbawi al-Islâmî: Muqaddimah fi Uşûliha al-Ijtima'iyah wa al-'Aqlaniyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Setyaningsih, R. (2016). *Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia*. 11(1), 17. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v11i1.651>
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- Sidiq, U. (2018). Etika dan Profesi Keguruan. Tulungagung: Penerbit STAI [Sekolah Tinggi Agama Islam] Muhammadiyah. Tersedia Secara Online Juga Di: <Http://Repository.iainponorogo.Ac.Id/395/1/Etika>, 20, 26.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Smith, W. C. (1959). *Islam in modern history*.
- Sulistiani, S. L. (2018). PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- Syams ad-Din, A. al-Amir. (1985). *Al-Fikr at-Tarbawî 'ind Ibn Sahnûn wa al-Qabisi*. Dâr Iqra'.
- Taufik, M. (2018). ETIKA PLATO DAN ARISTOTELES: *Jurnal Refleksi*, 18(1), 27–45. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14421/ref.2018.%25x](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/ref.2018.%25x)